



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Advokasi Media Sosial *Black Lives Matter* untuk Mengubah  
Kebijakan Diskriminatif terhadap *African-Americans* di Amerika  
Serikat**

Skripsi

Oleh

Cynthia Tanudjaja

2016330141

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Advokasi Media Sosial *Black Lives Matter* untuk Mengubah  
Kebijakan Diskriminatif terhadap *African-Americans* di Amerika  
Serikat**

Skripsi

Oleh

Cynthia Tanudjaja

2016330141

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP, M.A

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Persetujuan Skripsi**

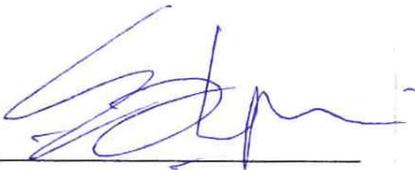
Nama : Cynthia Tanudjaja  
Nomor Pokok : 2016330141  
Judul : Advokasi Media Sosial *Black Lives Matter* untuk Mengubah Kebijakan Diskriminatif terhadap *African-Americans* di Amerika Serikat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 25 November 2019  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

: 

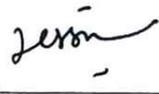
**Sekretaris**

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

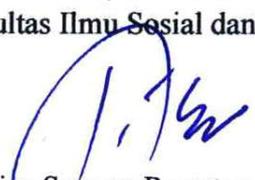
: 

**Anggota**

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cynthia Tanudjaja

NPM : 2016330141

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Advokasi Media Sosial *Black Lives Matter* untuk Mengubah Kebijakan Diskriminatif terhadap *African-Americans* di Amerika Serikat

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 November 2019



Cynthia Tanudjaja

2016330141

## ABSTRAK

Nama : Cynthia Tanudjaja  
NPM : 2016330141  
Judul Skripsi : Advokasi Media Sosial *Black Lives Matter* untuk Mengubah Kebijakan Diskriminatif terhadap *African-Americans* di Amerika Serikat

---

Diskriminasi ras terhadap *African-Americans* menghasilkan tindak kekerasan dan pembunuhan, terlihat dari banyaknya kasus pembunuhan masyarakat kulit hitam oleh aparat kepolisian. Menanggapi masalah diskriminasi tersebut, *Black Lives Matter* (BLM) merupakan salah satu gerakan terbesar yang menggunakan media sosial sebagai sarana advokasi untuk memperjuangkan hak *African-Americans*. Cara yang dilakukan BLM berbeda dengan gerakan sosial sebelumnya yang hanya menggunakan media konvensional seperti radio, televisi, koran, maupun selebaran. Dikarenakan perannya yang besar dalam mendorong perkembangan BLM menjadi sebuah gerakan sosial yang relevan dalam masyarakat, fokus media sosial dalam penelitian ini adalah *Facebook* dan *Twitter*. Periode penelitian dimulai di tahun 2013 sebagai awal terbentuknya gerakan BLM, dan diakhiri di tahun 2017 bersamaan dengan berakhirnya masa kepresidenan Obama. Pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana *Black Lives Matter* menggunakan media sosial untuk mengubah kebijakan diskriminatif terhadap *African-Americans* di Amerika Serikat?”. Analisis penelitian didasarkan pada teori *public sphere* yang menyatakan adanya ruang baru bagi masyarakat untuk berdialog dan mencapai komunikasi yang lebih demokratis. Dalam kasus ini, ruang baru tersebut adalah media sosial. Dengan tujuan untuk mencapai perubahan kebijakan di Amerika Serikat, media sosial digunakan oleh BLM untuk tiga hal yaitu: menyebarluaskan kasus pembunuhan *African-Americans*, memobilisasi respon dan dukungan, dan menyebarluaskan eksistensi rekomendasi kebijakan *A Vision for Black Lives* dan *Campaign Zero*. Tingginya pergerakan dukungan di media sosial meningkatkan dukungan terhadap rekomendasi kebijakan yang ditawarkan BLM. Beberapa rekomendasi kebijakan sudah diimplementasikan, namun belum mampu menciptakan hasil efektif secara menyeluruh.

**Kata Kunci :** Black Lives Matter, diskriminasi, gerakan sosial, advokasi, media sosial

## **ABSTRACT**

Name : Cynthia Tanudjaja  
Student ID : 2016330141  
Thesis Title : *Black Lives Matter's Social Media Advocacy to Change US Discriminative Policy towards African-Americans*

---

*Racial discrimination towards African-Americans has created a severe issue of violence and murder, which is shown by a high number African-Americans killed by police. Responding to the issue, Black Lives Matter (BLM) is one of the biggest social movement using social media as a platform to advocate black rights. Differing from past social movements that used conventional media such as radio, television, newspaper, or pamphlet as their platform, BLM uses different kind of approach by using social media. This research focuses on the usage of Facebook and Twitter as the social media that pushed the growth of BLM, creating it a relevant movement to society. Timeline limit of this research ranged from 2013 when BLM was first created, to 2017 along with the end of Obama's presidency. The research question is "How Black Lives Matter Used Social Media to Change US Discriminative Policy towards African Americans?". The analysis of this research is based on the public sphere theory. Emphasizing the existence of new platform for society to have more democratic dialogues and communication. In this research, the public sphere is social media. To create changes in US Policy, BLM used social media for three main efforts: to spread cases of killings toward African-Americans, to mobilize the respond and support given by society, and to spread the existence of policy recommendations naming projects such as A Vision for Black Lives and Campaign Zero. High amount of support in social media also increased the support towards policy recommendations presented by BLM. Several policies has been approved and implemented by police departments in the US. Nevertheless, it has yet created a thoroughly effective result.*

**Keywords :** *Black Lives Matter, discrimination, social movement, advocacy, social media*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala berkat dalam setiap langkah penyusunan skripsi hingga mampu menyelesaikan tepat pada waktunya. Penelitian ini menjelaskan advokasi *Black Lives Matter* menggunakan media sosial untuk mengubah kebijakan diskriminatif terhadap *African-Americans*, dan merupakan prasyarat untuk menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini mencakup analisa mengenai penggunaan media sosial sebagai platform bagi gerakan *Black Lives Matter* untuk menggerakkan dukungan keadilan bagi *African-Americans*, serta dukungan dalam perubahan kebijakan di Amerika Serikat. Melihat keseluruhan proses dari advokasi yang dilakukan *Black Lives Matter*, media sosial memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan pengaruh gerakan itu sendiri. Sehingga dukungan di media sosial yang diperoleh *Black Lives Matter* mampu diarahkan menjadi alat untuk menekan perubahan kebijakan terkait masalah diskriminasi dan mendorong keadilan bagi *African-Americans*.

Penulis mengucapkan Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing, Ratih Indraswari, S.IP., M.A. yang telah memberi arahan selama proses penulisan skripsi ini hingga mampu menyelesaikan dengan hasil terbaik. Maka dari itu, penulis berharap agar skripsi ini bisa menjadi karya yang bermanfaat. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini.

Bandung, 18 November 2019

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Biggest gratitude to :*

***Hanadi Tanudjaja (Papa), Linda (Mama), & Ronaldo Saputra Tanudjaja*** – for being my greatest support and motivation throughout my entire life. I love you.

***Lusi Chin, Maria Putri Adianti*** – for constantly reminding me of my strength.

***Olivia Bernadeth, Vheren Xhalliwang*** – for your companion and never-ending joy.

***Ginza Setiawan, Dear Siska, Kezia Naduma, Brigitta Fella Pradhita, Angelreika Libowo*** – for staying strong of our friendship and always being supportive.

***Helen Winata, Lea Florencia, Atika Silvia, Yosefin Noviana*** – for being such wonderful friends throughout my uni days.

***The Delegation of Kuwait*** – for the unforgettable 6 months and being the best team.

***Ratih Indraswari S.IP, M.A*** – for the guidance and wisdom you passed on to me.

*I am profoundly grateful and would like to express my respect to all of you.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR AKRONIM.....</b>	<b>x</b>

## **BAB I**

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3 Perumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4 Kajian Literatur .....	12
1.5 Kerangka Pemikiran.....	18
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
1.6.1 Metode Penelitian .....	27
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	28
1.7 Sistematika Pembahasan .....	28

## **BAB II**

<b>MASALAH RASISME TERHADAP <i>AFRICAN-AMERICANS</i> DI AMERIKA SERIKAT.....</b>	<b>29</b>
2.1 Latar Belakang Diskriminasi Ras di Amerika Serikat .....	29
2.1.1 Perang Saudara : Perbudakan <i>African-Americans</i> .....	30
2.1.2 <i>Ku Klux Klan</i> : Anti <i>African-Americans</i> oleh Supremasi Kulit Putih .....	32
2.1.3 Jim Crow : Memperburuk Diskriminasi <i>African-Americans</i> .....	34
2.2 Penembakan <i>African-Americans</i> .....	35
2.2.1 Latar Belakang Penembakan <i>African-Americans</i> .....	36
2.2.2 Penindaklanjutan Kasus Kekerasan dan Pembunuhan yang dilakukan Aparat Kepolisian.....	38
2.2.3 Kebijakan yang Mendorong Diskriminasi dan Kekerasan terhadap <i>African-Americans</i> .....	41
2.3 Gerakan Sosial di Amerika Serikat .....	43
2.3.1 <i>Montgomery Bus Boycott</i> : Perlawanan Segregasi Ras .....	44
2.3.2 <i>Selma to Montgomery</i> : Perjuangan Hak Sipil <i>African-Americans</i> .....	46
2.3.3 Gerakan <i>Black Lives Matter</i> .....	48

## **BAB III**

<b>ADVOKASI MEDIA SOSIAL <i>BLACK LIVES MATTER</i> UNTUK MENGUBAH KEBIJAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP <i>AFRICAN-AMERICANS</i> DI AMERIKA SERIKAT.....</b>	<b>51</b>
3.1 Media Sosial Sebagai Pendorong Kemunculan <i>Black Lives Matter</i> .....	51
3.1.1 <i>Facebook</i> dalam Menyatukan Para Aktivis <i>Black Lives Matter</i> .....	52
3.1.1.1 <i>Facebook</i> : Munculnya Inisiatif <i>#BlackLivesMatter</i> .....	52
3.1.1.2 <i>Facebook: Public Sphere</i> Menciptakan Ruang Baru untuk Komunitas .....	54
3.1.2 <i>Twitter</i> dalam Menyebarkan <i>#BlackLivesMatter</i> .....	55
3.1.2.1 <i>Twitter</i> : Membangun Dukungan Publik .....	56
3.1.2.2 <i>Twitter</i> : Akselerasi dan Transparansi dari <i>New Media</i> .....	57

3.1.3 Fungsi <i>Public Sphere</i> dari Media Sosial Mendorong Kemunculan <i>Black Lives Matter</i> .....	59
3.2 Advokasi <i>Black Lives Matter</i> : <i>Social Campaign</i> di Media Sosial .....	61
3.2.1 Perjuangan Pertama <i>Black Lives Matter</i> : Trayvon Martin .....	63
3.2.2 Advokasi Media Sosial dan Demonstrasi : Michael Brown .....	65
3.2.3 Kemunculan Protes yang Digerakkan Para Aktivis : Eric Garner .....	67
3.2.4 Melawan Diskriminasi dengan Target Kebijakan .....	69
3.2.4.1 <i>A Vision for Black Lives</i> : Keadilan Bagi <i>African-Americans</i> .....	73
3.2.4.2 <i>Campaign Zero</i> : Melawan Kekerasan Aparat Kepolisian .....	76
3.2.4.3 Aktivis <i>Black Lives Matter</i> Sebarkan Eksistensi Rekomendasi Kebijakan Melalui <i>Twitter</i> .....	82
3.2.5 Penggunaan <i>Public Sphere</i> Sebagai Alat Advokasi <i>Black Lives Matter</i> ...	86
3.3 Hasil Advokasi <i>Black Lives Matter</i> .....	90
3.3.1 Badan Kepolisian Adopsi Rekomendasi Kebijakan <i>Campaign Zero</i> .....	90
3.3.2 Penurunan Angka Korban Pembunuhan oleh Aparat Kepolisian .....	95
3.3.3 Hasil Efektif Belum Tercapai Secara Menyeluruh .....	96
<b>BAB IV</b>	
<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>105</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Perbedaan Jumlah Pemberian Hukuman Berdasarkan Ras.....	38
Gambar 3.1	: 10 Solusi Kebijakan <i>Campaign Zero</i> .....	72
Gambar 3.2	: <i>Tweet</i> DeRay McKesson Menyampaikan Pembentukan <i>Campaign Zero</i> .....	78
Gambar 3.3	: <i>Tweet</i> DeRay McKesson Mengenai Pertemuan dengan Bernie Sanders .....	79
Gambar 3.4	: <i>Tweet</i> DeRay McKesson Mengenai Pertemuan dengan Hillary Clinton.....	79
Gambar 3.5	: <i>Tweet</i> Samuel Sinyangwe Mengenai <i>Police Scorecard</i> .....	80
Gambar 3.6	: Implementasi Rekomendasi Kebijakan <i>Campaign Zero</i> .....	85
Gambar 3.7	: Penurunan Kasus Pembunuhan oleh Aparat Kepolisian yang Sejalan dengan Penerapan Kebijakan .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Penerapan Kebijakan Penggunaan Kekerasan di Badan Kepolisian .....	87
Tabel 3.2	: Korban Pembunuhan oleh Aparat Kepolisian.....	89
Tabel 3.3	: Penggunaan <i>Body Camera</i> oleh Aparat Kepolisian.....	92

## DAFTAR AKRONIM

BLM	Black Lives Matter
DOD	The U.S. Department of Defense
KKK	Ku Klux Klan
LAPD	Los Angeles Police Department
LGBT	Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender
MIA	Montgomery Improvement Association
NAACP	National Association for the Advancement of Colored People
O.C.G.A	Official Code of Georgia Annotated
SCLC	Southern Christian Leadership Conference
SNCC	Student Nonviolent Coordinating Committee
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	United Nations Children's Fund
WPC	Women's Political Council

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Rasisme adalah sebuah ideologi atau sistem kepercayaan yang dibangun untuk mempertahankan situasi ketidakadilan dalam ras dan etnis.<sup>1</sup> Rasisme berkaitan erat dengan konsep diskriminasi yaitu bentuk perilaku yang menentang pemberian akses secara adil bagi kelompok etnis tertentu dalam suatu kesatuan masyarakat.<sup>2</sup> Isu rasisme sudah muncul sejak era kolonisasi tahun 1700an, tepatnya saat masyarakat Afrika dikirim ke Amerika Serikat untuk dijadikan budak atau pelayan bagi kalangan masyarakat berkulit putih.<sup>3</sup> Masyarakat berkulit putih memiliki hak atau keunggulan secara sosial dan hukum, sedangkan perilaku diskriminasi dilakukan terhadap masyarakat yang bukan merupakan bagian dari kalangan tersebut. Hak istimewa yang diberikan pada masyarakat berkulit putih berupa kemudahan akses terhadap kekuasaan, hak kewarganegaraan, pendidikan, hak memilih, kepemilikan wilayah, imigrasi, dan penindaklanjutan kriminalitas.<sup>4</sup>

Ketidakadilan akibat paham rasisme telah terjadi dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah melalui kekerasan dan dalam proses pengadilan. Pihak

---

<sup>1</sup> M. Marger, *Race and ethnic relations: American and global perspectives (9<sup>th</sup> ed.)*, (Belmont: Wadsworth, 2012): 25

<sup>2</sup> *Ibid.*, 57

<sup>3</sup> Ibram X. Kendi, "A History of Race and Racism in America, in 24 Chapters", *The New York Times*, 22 February 2017, diakses pada 28 Februari 2019, <https://www.nytimes.com/2017/02/22/books/review/a-history-of-race-and-racism-in-america-in-24-chapters.html>

<sup>4</sup> Francis E. Kendall, "Understanding White Privilege", *Christian Peacemaker Teams* (2002): 2-7

kepolisian akan menjadikan masyarakat kulit hitam atau hispanik sebagai target investigasi. Masyarakat kulit hitam atau *'people with color'* lainnya lebih sering menjadi target pelaku dibandingkan masyarakat kulit putih, serta lebih mungkin juga untuk diberi hukuman penjara. Para pengacara dan jaksa dalam sistem hukum juga akan cenderung memberikan ancaman maupun hukuman yang lebih berat bagi masyarakat kulit hitam dan hispanik.<sup>5</sup> Michael Tonry menyatakan bahwa masyarakat kulit putih cenderung menggunakan tindakan kekerasan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat kulit hitam sebagai alasan dibalik rasa permusuhan yang dimiliki masyarakat kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam. Bagi masyarakat kulit putih, masyarakat kulit hitam dipandang sebagai pihak yang pantas menerima perlakuan kasar dari sistem hukum pidana.<sup>6</sup>

Terdapat pula konsep *"negrophobia"* yang merupakan pandangan irasional terhadap masyarakat kulit hitam. Konsep *negrophobia* ini menjelaskan rasa takut terhadap orang kulit hitam atau ketakutan untuk menjadi korban dari orang kulit hitam.<sup>7</sup> Konsep ini menekankan perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat dengan kompleksitas negro, bahwa apabila fitur fisik seseorang lebih mengarah ke kompleksitas negro maka perlakuan diskriminasi terhadapnya akan lebih parah dibandingkan seseorang yang memiliki kulit lebih putih atau rambut yang lebih lurus. Salah satu contoh ketidakadilan dalam bentuk kekerasan adalah keributan di Watts tahun 1965 yang menghasilkan banyak korban. Keributan ini berawal dari

---

<sup>5</sup> Nazgol Ghandnoosh, "Black Lives Matter: Eliminating Racial Inequity in the Criminal Justice System", *The Sentencing Project* (2015): 4

<sup>6</sup> Cassandra Chaney dan Ray V. Robertson, "Racism and Police Brutality in America", *Springer Science+Business Media New York* (2013): 481

<sup>7</sup> *Ibid.*, 482

penangkapan seorang pengendara motor *African-American* bernama Marquette Frye oleh Lee W. Minikus, seorang polisi berkulit putih. Penangkapan tersebut menghasilkan teror di wilayah Watts selama enam hari.<sup>8</sup> Selain itu, terdapat berbagai kasus penyerangan terhadap masyarakat kulit hitam oleh pihak kepolisian Amerika Serikat seperti keributan di Harlem tahun 1920an, kekerasan hukum terhadap perempuan berkulit hitam, pemukulan Rodney King oleh *Los Angeles Police Department* (LAPD) tahun 1991, penembakan Amadou Diallo tahun 1999 oleh *New York City Police Department*, serta penembakan Trayvon Martin oleh George Zimmerman di tahun 2012.<sup>9</sup> Banyaknya tindak kekerasan terhadap masyarakat kalangan kulit hitam tersebut dianggap sebagai sebuah fenomena *racial bias* atau diskriminasi terhadap *colored race*. Perilaku rasisme ini telah menjadi persepsi umum, bahkan menjadi ideologi yang diterapkan sejak masa kolonisasi.

Di sisi lain, isu rasisme di Amerika Serikat tidak sepenuhnya diterima begitu saja. Dalam upaya melawan diskriminasi ras tersebut, telah dilaksanakan berbagai macam gerakan hak masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan sosial di Amerika Serikat. Mulai pertengahan abad ke-20, masyarakat *African-American* beserta dengan beberapa masyarakat kulit putih melakukan perlawanan demi keadilan. Pada tahun 1868, Konstitusi Amandemen Konstitusi ke-14 memberikan hak perlindungan yang sama bagi masyarakat kulit hitam, dilanjutkan dengan amandemen ke-15 yang memberikan hak untuk melakukan pemilihan umum. Namun upaya tersebut terhambat dengan pemisahan masyarakat kulit putih dengan

---

<sup>8</sup> Civil Rights Digital Library, "Watts Riots", *Civil Rights Digital Library*, diakses pada 28 Februari 2019, [http://crdl.usg.edu/events/watts\\_riots/?Welcome](http://crdl.usg.edu/events/watts_riots/?Welcome)

<sup>9</sup> Chaney, *Op.cit*, 481

hitam melalui hukum Jim Crow.<sup>10</sup> Masyarakat kulit hitam tidak lagi dapat menggunakan fasilitas publik yang sama dengan masyarakat kulit putih, tidak dapat tinggal di kota yang sama, serta tidak mampu menempuh pendidikan di sekolah yang sama. Selain itu, pernikahan antar ras juga dilarang pada masa itu.<sup>11</sup> Sebelum Perang Dunia ke-2, terdapat diskriminasi dalam ranah militer bagi masyarakat kulit hitam, mereka tidak diberikan hak pekerjaan yang sama layaknya masyarakat kulit putih. Menanggapi ketidakadilan tersebut, ribuan masyarakat kulit hitam menekan pemerintah untuk mendorong keadilan dalam lapangan pekerjaan. Presiden Franklin D. Roosevelt akhirnya mengeluarkan *Executive Order 8802* tahun 1941 untuk memberikan hak untuk bekerja secara adil bagi seluruh warga negara tanpa melihat ras, warna kulit, maupun nasionalitas warga.<sup>12</sup>

Upaya dalam memperjuangkan hak kulit hitam juga terlihat dari *Montgomery Improvement Association* (MIA) yang dipimpin oleh Martin Luther King, Jr. untuk memfokuskan perhatian nasional terhadap segregasi ras.<sup>13</sup> Pada 28 Agustus 1963, terjadi *March on Washington for Jobs and Freedom* yang merupakan gerakan hak masyarakat sipil terbesar pada masa itu. Sekitar 250,000 warga ikut terlibat untuk mendukung gerakan tersebut. Gerakan ini dilakukan untuk

---

<sup>10</sup> Constitutional Rights Foundation, "In the Courts", *Constitutional Rights Foundation*, diakses pada 28 Februari 2019, <http://www.crf-usa.org/brown-v-board-50th-anniversary/in-the-courts.html>

<sup>11</sup> Constitutional Rights Foundation, "A Brief History of Jim Crow", *Constitutional Rights Foundation*, diakses pada 28 Februari 2019, <http://www.crf-usa.org/black-history-month/a-brief-history-of-jim-crow>

<sup>12</sup> Our Documents, "Executive Order 8802: Prohibition of Discrimination in the Defense Industry (1941)", *Our Documents*, diakses pada 28 Februari 2019, <https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=72>

<sup>13</sup> Stanford University, "Montgomery Improvement Association (MIA)", *Stanford University*, 5 Desember 1955, diakses pada 28 Februari 2019, <https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/montgomery-improvement-association-mia>

memperjuangkan isu diskriminasi dalam lapangan pekerjaan, kekerasan terhadap hak sipil masyarakat *African-American*, Latina, dan kelompok lainnya, serta dukungan terhadap Civil Rights Act yang sedang diupayakan pemerintahan Kennedy pada saat itu.<sup>14</sup> Gerakan hak masyarakat sipil di Selma, Alabama tahun 1961-1964 yang dilakukan *Student Nonviolent Coordinating Committee* (SNCC) dan *Southern Christian Leadership Conference* (SCLC) melibatkan sejumlah demonstran untuk menanggapi masalah hak pemilihan bagi masyarakat kulit hitam. Gerakan ini juga dipimpin oleh Martin Luther King, Jr., hingga kemudian *Bloody Sunday* ditayangkan di seluruh dunia. Demonstrasi ketiga yang merupakan demonstrasi terakhir gerakan di Alabama ini menghasilkan kesuksesan yaitu perolehan hak memilih yang adil bagi masyarakat kulit hitam.<sup>15</sup>

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Menanggapi masalah rasisme di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak era kolonisasi, banyak gerakan-gerakan anti-rasisme yang memberdayakan dukungan terhadap masyarakat kulit hitam. Sejak kasus pembunuhan remaja usia 17 tahun yaitu Trayvon Martin oleh George Zimmerman di tahun 2013, tiga pemrakarsa radikal masyarakat kulit hitam Alicia Garza, Patrisse Cullors, dan Opal

---

<sup>14</sup> National Park Service, "March on Washington for Jobs and Freedom", *National Park Service*, 10 Agustus 2017, diakses pada 28 Februari 2019, <https://nps.gov/articles/march-on-washington.htm>

<sup>15</sup> Jessie Kindig, "Selma Alabama (Bloody Sunday, March 7, 1965)", *Blackpast*, 24 November 2007, diakses pada 28 Februari 2019, <https://www.blackpast.org/african-american-history/bloody-sunday-selma-alabama-march-7-1965/>

Tometi membentuk gerakan yang dinamakan *Black Lives Matter* (BLM). Bermula dari inisiatif menggunakan *hashtag* yaitu *#BlackLivesMatter* di *Twitter* dan *Facebook*, penggunaan media sosial untuk menyebarkan kesadaran terhadap ketidakadilan sosial dan kekerasan pihak kepolisian ini berhasil diterima oleh masyarakat di Amerika Serikat. Kekuatan yang diberikan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan eksistensi gerakan tersebut menjadikan BLM semakin relevan hingga pada akhirnya dibentuk menjadi sebuah organisasi.<sup>16</sup>

Sebagai gerakan sosial, BLM menggunakan beberapa cara yang berbeda dengan gerakan sosial pada umumnya. Sejak akhir tahun 1960an, semakin banyak kemunculan aktivitas gerakan sosial di wilayah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.<sup>17</sup> Gerakan sosial ini pada umumnya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dianggap perlu disampaikan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, serta untuk melakukan aksi protes. Perhatian masyarakat luas menjadi sasaran bagi gerakan sosial agar mampu memperoleh dukungan terkait isu yang diangkat. Untuk menjalankan aktivitasnya, diperlukan wadah sebagai sarana penyampaian protes tersebut kepada pihak yang dituju. Sarana yang digunakan berupa media massa konvensional seperti media cetak koran, buku, majalah, TV, dan radio. Publikasi isu ini juga cenderung diikuti dengan berbagai macam aktivitas seperti demonstrasi, protes secara langsung, maupun bentuk advokasi dari para aktor yang dipandang

---

<sup>16</sup> Black Lives Matter, "HerStory", *Black Lives Matter*, diakses pada 28 Februari 2019, <https://blacklivesmatter.com/about/herstory/>

<sup>17</sup> Jacqueliën van Stekelenburg dan Bert Klandermans, "Social Movement Theory: Past, Presence & Prospect", *Vrije Universiteit Amsterdam*, (2009)

masyarakat.<sup>18</sup> Media konvensional disini menjadi lingkup dunia publik yang merupakan sarana *public sphere*.

Penggunaan cara-cara konvensional tersebut terlihat dalam kasus *Montgomery Bus Boycott* tahun 1955 hingga 1956 yang diawali dengan tindakan Rosa Parks. Parks menempati kursi dalam sebuah bus pada bagian “*colored section*” atau yang khusus ditujukan pada masyarakat yang tidak berkulit putih. Setelah kursi yang khusus untuk ditempati masyarakat kulit putih sudah penuh, Parks menolak untuk memberikan kursinya untuk seorang kulit putih. Tindakannya ini mengakibatkan hukuman penjara dan denda sebesar \$10 dan tambahan \$4 untuk biaya pengadilan. Sejak kasus tersebut, *Women’s Political Council* (WPC) menyebarkan selebaran yang mengajak aksi boikot pada tanggal 5 Desember. Pada hari Minggu tanggal 4 Desember, diumumkan aksi boikot di gereja, dilanjutkan aksi boikot oleh 40,000 pengendara bis *African-American* pada hari selanjutnya. Kejadian ini mendorong diangkatnya Martin Luther King sebagai pemimpin gerakan hak sipil, serta dalam pembentukan kebijakan yang mendukung keadilan dalam hak perlindungan masyarakat terlepas ras.<sup>19</sup>

Jika dibandingkan dengan sarana media yang digunakan BLM, terjadi pergeseran dari penggunaan media konvensional menjadi media sosial. Media sosial berupa *website* dan aplikasi, menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk membuat dan menyebarkan konten serta berpartisipasi dalam jaringan sosial

---

<sup>18</sup> Alonit Berenson, “Journalism and Social Media Frame Social Movements: The Transition to Media Matrix”, *Social Media and Journalism – Trends, Connections, Implication*, (2018)

<sup>19</sup> History, “Montgomery Bus Boycott”, *History*, 3 Februari 2010, diakses 26 Agustus 2019, <http://www.history.com/topics/black-history/montgomery-bus-boycott>

di internet, seperti misalnya *Facebook*, *YouTube*, dan *Twitter*.<sup>20</sup> Perkembangan media digital dimanfaatkan BLM sebagai sarana untuk menyebarkan pengaruhnya. Pada masa pembentukan BLM, media sosial menjadi sebuah sarana yang banyak diakses masyarakat. Melihat kondisi tersebut, BLM menggunakan media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* untuk menyebarkan isu-isu yang ingin diangkatnya.

BLM menggunakan fungsi *new media* sebagai sarana untuk menyebarluaskan perspektif dan pengaruh terhadap masyarakat luas. Dalam hal ini, *new media* berupa media sosial menjadi lingkup publik baru untuk menjalankan fungsi *public sphere*. Tepatnya melalui penyebaran *#BlackLivesMatter* di *Twitter* yang kemudian menarik perhatian banyak masyarakat terhadap kasus pembunuhan Michael Brown pada tahun 2014.<sup>21</sup> Permulaan gerakan *hashtag* tersebut juga didorong melalui peran *Facebook* dalam menyatukan kesamaan persepsi para aktivis dalam menghadapi masalah pembunuhan Michael Brown. BLM tetap menggunakan cara-cara gerakan sosial tradisional seperti demonstrasi langsung serta melalui peran advokasi para aktor terkemuka. Namun perbedaan cara BLM yang penting ditekankan adalah penggunaan media sosial *Twitter* dalam meningkatkan pengaruhnya tersebut. Terdapat sekitar 40 juta *tweets* terkait kasus penembakan Michael Brown. Melalui kasus ini pula penggunaan *hashtag* semakin banyak digunakan dan membantu persebaran dukungan terhadap penyelesaian kasus-kasus serupa lainnya seperti kasus penembakan Ezell Ford, Laquan

---

<sup>20</sup> Simeon O. Edosomwan, "The history of social media and its impact on business", *The Journal of Applied Management & Entrepreneurship*, (2011)

<sup>21</sup> Josh Hafner, "How Michael Brown's death, two years ago, pushed #BlackLivesMatter into a movement", *USA Today*, 10 Agustus 2016, diakses pada 21 Maret 2019, <https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2016/08/08/how-michael-browns-death-two-years-ago-pushed-blacklivesmatter-into-movement/88424366/>

McDonald, Akai Gurley, Antonio Martin, Tamir Rice, dan lain sebagainya. Besarnya respon masyarakat yang dikembangkan melalui *Twitter* menjadikan *BLM* menjadi bentuk gerakan nasional.<sup>22</sup>

Gerakan sosial pada masa pembentukan BLM menggunakan peran besar dari *new media* yaitu media sosial, untuk menyebarkan isu dan perhatian masyarakat akan BLM sendiri. Penggunaan *hashtag* mampu menarik perhatian masyarakat yang cenderung memperhatikan media sosial. Keberhasilan BLM dalam mengenalkan masyarakat akan gerakannya tersebut juga mampu mendorong dukungan terhadap berbagai macam kasus kekerasan akibat diskriminasi ras terhadap *African-Americans*. Lain halnya dengan gerakan sosial tradisional yang cenderung menggunakan aksi demonstrasi dan boikot sebagai upaya dasar mereka dalam menarik perhatian masyarakat, seperti kasus *Montgomery Bus Boycott* yang menggunakan selebaran dan ajakan-ajakan secara langsung untuk menarik perhatian masyarakat terkait isu yang ingin disebar. Keduanya memiliki pengaruh yang besar meskipun menggunakan cara yang berbeda. Hal ini pula yang mendorong BLM untuk tetap mengimbangi peran besar dari media sosial dengan aksi-aksi tradisional lainnya seperti demonstrasi dan advokasi melalui pidato.

Gerakan BLM berkembang menjadi sebuah proyek untuk mendukung perlawanan aksi kekerasan terhadap masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Gerakan BLM ini mendorong kebebasan masyarakat kulit hitam khususnya perempuan, *queer*, transgender, dan transeksual. Dorongan terhadap masyarakat

---

<sup>22</sup> Hafner, *Loc.cit*

kulit hitam di golongan tersebut lebih ditekankan dalam BLM karena adanya kecenderungan gerakan *black liberation* yang hanya mendukung laki-laki yang heteroseksual dan *cisgender*. Secara keseluruhan BLM ditujukan untuk mendukung kehidupan seluruh masyarakat kulit hitam.<sup>23</sup>

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran dan aktivitas dari gerakan sosial *BLM* dalam menghadapi isu rasisme terhadap masyarakat kulit hitam atau *African-Americans* di Amerika Serikat. Penelitian ini secara khusus memusatkan pada organisasi BLM sebagai aktor utama. Hal ini dikarenakan BLM merupakan salah satu gerakan sosial terbesar yang dibentuk menggunakan sarana media sosial.

Data penelitian ini juga mengkaji secara spesifik aktivitas dan proses dari gerakan tersebut dalam mengubah kebijakan di Amerika Serikat. Proses yang dijalankan gerakan BLM dilihat berdasarkan penggunaan media sosial sebagai sarana advokasi untuk mengubah kebijakan diskriminatif terhadap *African-Americans*, khususnya kebijakan di dalam badan kepolisian Amerika Serikat.

Media sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Twitter* dan *Facebook*. Fokus pengkajian kedua media sosial tersebut dikarenakan *Twitter* dan *Facebook* merupakan media yang menjadi awal mula terbentuknya gerakan BLM, serta

---

<sup>23</sup> Black Lives Matter, *Op.cit.*

merupakan media yang mendorong terciptanya perhatian dan dukungan terbesar dari masyarakat akan aktivitas yang dilakukan BLM.

Pembatasan periode waktu penelitian yang dimulai pada tahun 2013 dikarenakan gerakan sosial BLM pertama kali terbentuk di tahun tersebut. Sedangkan periode waktu penelitian yang berakhir di tahun 2017 didasarkan pada berakhirnya masa kepresidenan Barack Obama. Dengan berakhirnya periode kepemimpinan presiden Obama, dapat dilihat seluruh proses beserta hasil advokasi BLM secara konkret.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

BLM telah menciptakan perubahan struktur sosial dan persepsi masyarakat di Amerika Serikat mengenai isu rasisme. Oleh karena itu untuk membatasi fokus penelitian, pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini adalah “Bagaimana *Black Lives Matter* Menggunakan Media Sosial untuk Mengubah Kebijakan Diskriminatif terhadap *African-Americans* di Amerika Serikat?”.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini menjelaskan bagaimana gerakan *BLM* melalui media sosial mampu menciptakan perubahan dalam struktur sosial, yaitu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat luas terkait isu rasisme serta memperoleh dukungan publik.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui proses advokasi BLM melalui media sosial untuk mengubah kebijakan di Amerika Serikat yang dianggap merugikan dan mendorong diskriminasi terhadap *African-Americans*.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini salah satunya adalah sebagai syarat akhir kelulusan studi jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Selain itu, hasil penelitian ini kemudian juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi umum, yakni untuk digunakan dalam mencari tahu tentang topik yang serupa.

## **1.4 Kajian Literatur**

Masalah rasisme di Amerika Serikat terhadap masyarakat *African-Americans* membawa aksi kekerasan hingga berakhir pada banyaknya kasus pembunuhan masyarakat kulit hitam, terutama oleh pihak kepolisian Amerika Serikat. Situasi ini mendorong terbentuknya gerakan yang diwadahi *#BlackLivesMatter* untuk memperjuangkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kehidupan masyarakat kulit hitam. Media sosial sebagai platform yang mampu menggerakkan pandangan masyarakat secara spontan dan luas menjadi alat atau instrumen BLM dalam mencapai tujuannya. Upaya gerakan sosial BLM ini mendorong adanya perubahan kebijakan dan hukum yang selama ini kurang mengedepankan kehidupan *African-Americans*. Oleh karena itu, kajian literatur ini

menyajikan beberapa pandangan yang membahas secara khusus peran BLM dalam membentuk perubahan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya isu rasisme melalui media sosial, serta pengaruhnya terhadap kebijakan, hukum yang berlaku, dan politik di Amerika Serikat. Literatur yang digunakan adalah karya Garrett Chase berjudul “*The Early History of the Black Lives Matter Movement, and the Implications Thereof*”<sup>24</sup>, artikel jurnal berjudul “*Making Black Lives Matter: Evidence-Based Policies for Reducing Police Bias in the Use of Deadly Force*” oleh Roger G. Dunham dan Nick Petersen<sup>25</sup>, serta “*Black Lives Matter: Racialised Policing in the United States*” oleh Jennifer Chernega<sup>26</sup>.

Berdasarkan artikel jurnal yang dibuat Garrett Chase (2018), BLM memberi pergeseran pandangan masyarakat di Amerika Serikat terhadap isu rasisme dan ketidakadilan yang dihasilkan dari isu tersebut selama tiga tahun setelah pembentukan BLM. Fungsi dasar BLM menggunakan perkumpulan kesatuan organisasi yang mendorong upaya-upaya persebaran kesadaran isu tersebut, diikuti dengan adanya dorongan kuat dari media sosial sehingga menjadikan BLM sebuah gerakan sosial modern yang telah menggerakkan kesadaran masyarakat secara efektif. Banyak pandangan menyatakan bahwa BLM hanyalah sekadar fenomena media sosial. Namun karena gerakan ini terus berkembang dan diupayakan secara konsisten, BLM dianggap sebagai suatu kekuatan yang sangat relevan dalam proses

---

<sup>24</sup> Garrett Chase, “The Early History of the Black Lives Matter Movement, and the Implications Thereof”, *Nevada Law Jurnal* 1091 (2018)

<sup>25</sup> Roger G. Dunham and Nick Petersen, “Making Black Lives Matter: Evidence-Based Policies for Reducing Police Bias in the Use of Deadly Force”, *Criminology & Public Policy: American Society of Criminology* (2017)

<sup>26</sup> Jennifer Chernega, “Black Lives Matter: Racialised Policing in the United States”, *Comparative American Studies An International Journal*, 14: 3-4 (2016)

perjuangan keadilan *African-Americans* di Amerika Serikat. BLM tidak seperti gerakan sosial di masa lalu, gerakan ini terus mempertahankan posisinya di mata umum. Demonstrasi, wawancara, peran dalam media sosial, serta diskusi berkala di sumber-sumber media tradisional telah menarik perhatian masyarakat terkait isu kekerasan terhadap masyarakat kulit hitam. Implikasi yang besar di masyarakat ini menunjukkan kekuatan BLM untuk terus berkembang di masa yang akan datang, membentuk kekuatan dan dorongan lebih besar pula terhadap negara dan opini publik untuk memberi perhatian serta menindaklanjuti isu ini secara komprehensif.<sup>27</sup>

Pembunuhan masyarakat kulit hitam di 2014 oleh aparat kepolisian mendorong adanya pertimbangan kembali terhadap fakta kebijakan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini pula yang ditekankan BLM dalam demonstrasi dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui upaya yang dilakukannya. Artikel jurnal yang dikeluarkan Roger G. Dunham dan Nick Petersen (2017) kembali menekankan beberapa aspek yang perlu diubah dalam politik Amerika Serikat terkait isu rasisme yang berkembang menjadi kekerasan dalam lingkup tersebut. Dunham dan Petersen menekankan diperlukannya perkembangan *database* nasional terkait kasus-kasus penembakan oleh polisi, meningkatkan profesionalitas polisi, memperkuat sistem intervensi dini sebelum masalah menjadi lebih kritis, melibatkan angkatan kepolisian dari berbagai etnis dan rasa atau meningkatkan keberagaman, memberdayakan dewan peninjauan masyarakat guna melibatkan persepsi masyarakat umum untuk pertimbangan, serta memperluas

---

<sup>27</sup> Chase, *Op.cit.*

penggunaan *body-worn cameras* untuk mengurangi aksi kekerasan polisi. Beberapa hal tersebut dinyatakan telah diterapkan di sebagian departemen kepolisian di Amerika Serikat guna mengurangi *bias* berdasarkan ras dalam penembakan, namun belum semua menerapkan kebijakan tersebut. Artikel jurnal Dunham dan Petersen ini menyatakan bahwa diperlukannya sumber pendanaan baru untuk mendorong implementasi kebijakan yang lebih adil. Dalam kata lain, gerakan sosial semata tidaklah cukup untuk mengubah kebijakan di Amerika Serikat yang berkaitan dengan isu rasisme secara menyeluruh.<sup>28</sup>

Artikel jurnal Jennifer Chernega (2016) menunjukkan adanya pengaruh BLM dalam dua aspek yaitu kesadaran masyarakat luas dan dalam kebijakan di Amerika Serikat. Kesadaran masyarakat terkait isu rasisme dalam kebijakan negara dan implementasinya sudah banyak diterima dan menyebar luas. Penggunaan *Twitter* menjadi faktor pendukung yang cukup besar terutama karena mayoritas masyarakat sekarang ini sangat terpengaruh oleh konten media sosial dan melakukan akses secara terus-menerus. BLM telah mengubah cara pendekatan jurnalis dalam menyampaikan isu ras, terutama terkait protes-protes masyarakat terhadap ketidakadilan ras. Dokumentasi data kekerasan oleh polisi lebih mudah dilakukan, sehingga upaya mempertahankan isu rasisme dalam kebijakan dan kekerasan polisi di mata publik juga lebih mudah. Sedangkan pengaruh BLM dalam kebijakan terlihat dari perubahan jumlah hukuman yang dikenakan terhadap aparat polisi yang bersalah atas kekerasan berbasis ras. Investigasi yang dilakukan *National Public Radio* menunjukkan bahwa jumlah hukuman atas pembunuhan yang

---

<sup>28</sup> Dunham dan Petersen, *Op.cit.*

dilakukan polisi selama 10 tahun hingga 2014 merupakan sekitar lima tersangka per tahunnya. Namun setelah November 2015, 15 polisi dihukum atas pembunuhan dan kekerasan terhadap masyarakat kulit hitam. Adanya peningkatan jumlah pemberian hukuman atau penindaklanjutan kasus terkait isu ini menunjukkan adanya hasil dari upaya tekanan demonstrasi dan protes yang dilakukan BLM. Selain itu, terjadi pula peningkatan perhatian politik terhadap perbaikan sistem pemenjaraan, dan mengurangi pemenjaraan massal.<sup>29</sup>

Berdasarkan literatur diatas, telah disinggung oleh ketiganya bahwa gerakan sosial yang mengangkat isu rasisme sangat berpengaruh terhadap kondisi kebijakan dan kesadaran masyarakat luas mengenai isu tersebut. BLM telah melakukan berbagai upaya hingga mampu menekan hukum dan kebijakan di Amerika Serikat untuk meninjau kembali penanganan terhadap masalah tersebut. Semakin besar implikasi dalam masyarakat juga mampu mendorong tekanan terhadap kebijakan formal yang secara langsung menanggapi isu tersebut. Meskipun berdasarkan beberapa Artikel jurnal diatas upaya yang dilakukan sejauh ini belum memiliki implikasi yang cukup besar, namun BLM berpotensi untuk berkembang menjadi kekuatan besar yang mampu mempengaruhi hukum dan kebijakan Amerika Serikat menuju keadilan yang lebih merata.

Pernyataan dalam artikel jurnal Garrett Chase dan Jennifer Chernega mengenai adanya pengaruh BLM untuk menggeser pandangan masyarakat terhadap masalah diskriminasi *African-Americans* dan meningkatkan kesadaran masyarakat

---

<sup>29</sup> Chernega, *Op.cit.*

menjadi acuan penelitian ini. Artikel jurnal Jennifer Chernega juga secara khusus menyatakan bahwa *Twitter* menjadi faktor pendorong kesadaran masyarakat dan perubahan kebijakan terkait masalah penembakan oleh aparat kepolisian. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok penelitian ini dan menjadi acuan dalam analisa. Sama halnya dengan pernyataan dalam karya Roger G. Dunham dan Nick Petersen, bahwa diperlukan aksi BLM untuk mengembangkan *database* nasional terkait kasus-kasus penembakan polisi, meningkatkan profesionalitas dan intervensi aparat kepolisian, serta penerapan *body camera*. Pernyataan tersebut sesuai dengan rekomendasi kebijakan BLM yang menjadi acuan dasar penelitian ini mengenai perubahan kebijakan di Amerika Serikat.

Akan tetapi, pembahasan dalam artikel jurnal Garrett Chase mengenai penggunaan media konvensional dan media sosial sebagai sarana BLM tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan media sosial. Pernyataan dalam artikel jurnal Roger G. Dunham dan Nick Petersen mengenai diperlukannya sumber pendanaan baru dalam badan kepolisian juga tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak sesuai dengan rekomendasi kebijakan yang ditawarkan BLM.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 *Public Sphere Theory*

Jurgen Habermas memperkenalkan teori *public sphere* dalam bukunya yang berjudul “*The Structural Transformation of the Public Sphere*”. Habermas menyatakan bahwa *public sphere* digunakan kaum borjuis untuk melakukan transformasi struktur sosial melalui upaya emansipatoris, serta menekankan demokratisasi atau hak untuk bersuara bagi seluruh pihak. Upaya emansipatoris berarti sebuah proses untuk membebaskan diri dari batasan yang menciptakan bentuk ketidakadilan.<sup>30</sup> Sedangkan demokratisasi berarti menjadikan sesuatu agar dapat diakses semua pihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>31</sup> Upaya emansipatoris dan demokratisasi ini menjelaskan adanya upaya untuk membebaskan diri dari struktur yang membatasi pihak-pihak tertentu. Pentingnya peran *public sphere* terlihat dari potensinya untuk mendorong pencapaian integrasi sosial. Penggunaan konsep ‘publik’ disini menekankan pada sekumpulan individu yang terlibat dalam perdebatan terkait otoritas negara.<sup>32</sup>

Mengubah struktur dalam institusi atau menggunakan *public sphere* untuk menyebarkan kebenaran yang baik dalam ideologi sebuah negara merupakan upaya untuk menyebarkan fakta yang bukan hanya sekadar manipulasi terhadap opini publik. Melainkan untuk menyebarkan fakta yang bersifat konkret memiliki tujuan revolusioner sehingga mampu mengubah struktur atau pandangan sosial terkait

---

<sup>30</sup> Graciela Montaldo, “Dialogues in Theory: Emancipation and Emancipatory Acts”, *Routledge* (2014): 338

<sup>31</sup> United Nations, *An Agenda for Democratization*, (New York: United Nations, 1996): 1

<sup>32</sup> Craig Calhoun, *Habermas and the Public Sphere*, (The MIT Press, 1992): 4-16

masalah yang diangkat. Dengan menggunakan cara demikian, lingkup dunia publik dapat digunakan sebagai otoritas yang mampu mempengaruhi politik, tidak hanya di bidang yang bersangkutan saja. Upaya ini mampu mendorong pencapaian prinsip demokrasi di lingkup tertentu. Oleh karena itu, *public sphere* menjadi instrumen atau alat untuk integrasi sosial berdasarkan komunikasi kolektif yang bersifat rasional dan kritis, bukan berdasarkan adanya dominasi suatu pihak.<sup>33</sup>

### 1.5.2 *New Media Theory*

Teori *new media* menekankan adanya perkembangan teknologi dan data yang terakselerasi, tidak hanya berakhir pada kemunculan komputer melainkan program-program lainnya yang lebih canggih seperti internet. Media tradisional seperti televisi, radio, fotografi, dan koran dialihkan menjadi media berbasis digital. Teori ini menekankan adanya komputerisasi yang mempengaruhi budaya masyarakat, perilaku, dan pandangan yang dimilikinya. Perkembangan teknologi baru yang semakin canggih ditandai dengan adanya penyebaran arus informasi yang cepat dan tidak terbatas jumlahnya.<sup>34</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, media teknologi modern sudah memiliki peran dalam upaya pemberdayaan dalam lingkup masyarakat di sebuah negara maupun secara internasional. Media teknologi baru mampu mendorong demokratisasi yang lebih terarah. Hal ini dikarenakan media

---

<sup>33</sup> Calhoun, *Loc.cit.*, 18-29

<sup>34</sup> Robert Hassan dan Julian Thomas, *The New Media Theory Reader*, (Open University Press, 2006): 7-9

teknologi secara langsung dapat mendorong keterlibatan peran masyarakat luas, terutama melalui penggunaan ‘media elektronik personal’.<sup>35</sup>

Berkaitan juga dengan teori *public sphere*, media internet dianggap mendukung terciptanya *public sphere*. Kecenderungan platform *new media* yang mampu menciptakan partisipasi dan komunikasi yang interaktif merupakan elemen yang sesuai dengan teori *public sphere* dari Habermas. Berdasarkan karakteristik tersebut pula *new media* internet juga dapat dikatakan berpotensi untuk mendukung terciptanya sistem politik yang lebih demokratis.<sup>36</sup> Kondisi ini didukung dengan adanya sifat komunikasi yang luas dan plural antara pihak yang terlibat didalamnya. Setiap individu dan kelompok dalam ranah media internet dapat turut berpartisipasi dalam diskusi dan perdebatan yang ada. Sifat kebebasan yang ditawarkan *new media* mendukung sistem untuk mendemokratisasi informasi yang disampaikan. Tidak ada satu pihak yang memiliki akses lebih terhadap suatu informasi dibandingkan dengan pihak lainnya.<sup>37</sup>

Media sosial adalah sejumlah aplikasi berbasis internet yang menjadi dasar terbentuknya dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, memberi kesempatan untuk menciptakan dan bertukar konten dari *user*.<sup>38</sup> *Web 2.0* mengindikasikan adanya perkembangan jaringan dari yang sebelumnya merupakan HTML statis menjadi jaringan yang lebih interaktif dan dinamis. Media sosial tersebut merupakan salah

---

<sup>35</sup> Hassan dan Thomas, *Loc.cit.*, 81-83

<sup>36</sup> Martin Lister, dkk., *New Media: A Critical Introduction Second Edition*, (Routledge, 2003): 218-220

<sup>37</sup> Douglas Kellner, “Techno-politics, new technologies, and the new public spheres”, *Illuminations*, (2001): 6

<sup>38</sup> Andreas M. Kaplan, Michael Haenlein, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, *Kelley School of Business*, (2010): 60-61

satu bentuk dari *new media*, namun sifatnya lebih interaktif secara sosial.<sup>39</sup> *Facebook* dan *Twitter* merupakan dua contoh media sosial. *Facebook* termasuk sebagai salah satu media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat. Aplikasi ini seringkali digunakan untuk membentuk kelompok diskusi yang menyediakan forum-forum interaktif. Melalui *Facebook*, terjadi dorongan untuk membentuk komunikasi yang lebih luas serta terciptanya komunitas di dalamnya.<sup>40</sup> Sedangkan *Twitter* merupakan sebuah aplikasi yang memberikan pelayanan *microblogging*.<sup>41</sup> Aplikasi ini memberi kesempatan bagi para *user* untuk membentuk dan bertukar konten melalui *tweet*. Di dalam *Twitter*, konten atau informasi (*tweet*) yang seringkali dibicarakan masyarakat luas akan dikategorikan sebagai konten yang sedang “*trending*”.<sup>42</sup>

### 1.5.3 Advokasi

Sebagai sebuah konsep, advokasi merupakan sebuah aksi memberi dukungan atau melakukan pembelaan terhadap suatu isu atau permasalahan. Dukungan tersebut dapat ditujukan untuk mempertahankan suatu isu atau bahkan mengubah kebijakan, hukum, tindakan, dan lain sebagainya. Advokasi juga dapat dilakukan dalam ranah politik, berfokus untuk mengubah sistem politik atau memberikan pengaruh terhadap keputusan pemerintah. Dalam hal ini, advokasi

---

<sup>39</sup> Chiara Valentini dan Dean Kruckeberg, “New Media versus Social Media: A Conceptualization of their Meanings, Uses and Implications for Public Relations”, *Peter Lang*, (2012): 6

<sup>40</sup> Christine Greenhow, Amy Chapman, Holly Marich, dan Emilia Askari, “Social Media and Social Networks (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, etc.)”, *SAGE*, (2017)

<sup>41</sup> Haewoon Kwak, Changhyun Lee, Hosung Park, dan Sue Moon, “What is Twitter, a Social Network or a News Media?”, *Raleigh*, (2010): 591-595

<sup>42</sup> *Ibid.*, 591-595

juga memanfaatkan partisipasi masyarakat agar mampu mempromosikan tujuan dan kepentingan bersama. Mickelson menyatakan bahwa advokasi merupakan sebuah strategi untuk mencapai keadilan sosial.<sup>43</sup>

Mengacu pada definisi menurut Richan, advokasi merupakan sebuah tindakan yang mewakili individu, kelompok, atau kelas individu yang dirugikan, serta pihak-pihak yang menjadi subjek diskriminasi dan ketidakadilan.<sup>44</sup> *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa proses advokasi berarti menyampaikan rekomendasi berdasarkan bukti atau fakta.<sup>45</sup> Aksi ini dapat dijalankan oleh aktor-aktor seperti individu, kelompok, dan komunitas sosial dalam lingkup masyarakat. Advokasi berfokus pada proses-proses yang diperlukan untuk mempengaruhi definisi dari isu atau masalah yang diangkat, menentukan solusi yang tepat, dan pada akhirnya menyampaikan agenda ini agar bisa diterima oleh para aparat politik, birokrat, dan para pengambil keputusan lainnya. Aktor-aktor tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam menentukan kebijakan yang dikeluarkan, juga dalam implementasi dari kebijakan itu sendiri.<sup>46</sup>

Aksi advokasi dilakukan melalui berbagai macam platform, salah satunya adalah melalui penggunaan internet. Seperti yang telah disampaikan melalui teori *new media*, media sosial mampu mendorong dan menyatukan masyarakat dan kelompok untuk melakukan upaya demokratisasi. Oleh karena itu, media sosial

---

<sup>43</sup> Michal Almog-Bar dan Hillel Schmid, "Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 43 (1), (2014): 13-15

<sup>44</sup> W. Richan, "Dilemmas of the social work advocate", *Child Welfare* 52(4), (1973): 233

<sup>45</sup> UNICEF, "Advocacy Toolkit", *UNICEF*, (2010): 3

<sup>46</sup> Barbara Klugman, "Effective social justice advocacy: a theory-of-change framework for assessing progress", *Reproductive Health Matters* 19 (38), (2011): 147

dapat membantu aktivitas dalam menjalankan advokasi. Media sosial mampu memudahkan advokasi, tepatnya dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat serta aksi kolektif. Popularitas dan akselerasi yang ditawarkan media sosial mampu mendorong kelompok-kelompok advokasi. Sarana media sosial membantu aksi advokasi agar mampu bersatu dengan beragam individu dalam masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap advokasi yang dilakukan tersebut, serta memperkuat upaya-upaya aksi kolektif karena adanya kecepatan komunikasi.<sup>47</sup>

#### **1.5.4 *Social Movement Theory***

Teori gerakan sosial menyatakan adanya upaya kolektif sekelompok masyarakat untuk menciptakan perubahan atau peralihan perhatian terhadap suatu isu tertentu. Upaya kolektif tersebut dilakukan melalui aktivitas seperti kampanye, demonstrasi, negosiasi aktor atau aktivis gerakan sosial terhadap pihak tertentu, dan lain sebagainya. Para aktivis dari gerakan sosial tersebut juga seringkali menjalin komunikasi secara langsung dengan para pembuat keputusan, kelompok kepentingan, dan komunitas pemerintah lainnya untuk menyampaikan pandangan atau isu yang ingin ditekankan melalui gerakan sosial. Gerakan sosial juga dapat muncul atas adanya ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kebijakan tertentu yang dijalankan pemerintah, atau untuk mengubah struktur sosial dalam suatu

---

<sup>47</sup> Jonathan A. Obar, Paul Zube, dan Clifford Lampe, "Advocacy 2.0: An Analysis of How Advocacy Groups in the United States Perceive and Use Social Media as Tools for Facilitating Civil Engagement and Collective Action", *Journal of Information Policy* 2, (2012): 14-16

negara. Faktanya, gerakan sosial mampu menciptakan perubahan terhadap kebijakan politik suatu negara. Di sisi lain juga, gerakan sosial mampu membawa pluralisasi dari tata cara pembentukan kebijakan politik, maka dalam konteks ini gerakan sosial telah memberi perubahan dalam budaya politik sebuah negara.<sup>48</sup>

Berdasarkan Mario Diani, gerakan sosial merupakan proses sosial dimana para aktornya terlibat dalam tiga bentuk aksi kolektif.<sup>49</sup> Pertama, terlibat dalam hubungan berkonflik dengan pihak lawan yang sudah teridentifikasi secara jelas. Para aktor gerakan sosial yang terlibat konflik berupaya untuk mendukung atau menentang perubahan dalam struktur sosial. Konflik tersebut terjadi antara para aktor yang menginginkan kekuatan dalam mengatur isu yang dipermasalahkan seperti politik, ekonomi, maupun budaya. Akan tetapi, hanya sekadar membahas masalah bersama atau memberi dukungan terhadap nilai tertentu tidak berarti mengindikasikan sebuah aksi dari gerakan sosial. Diperlukan identifikasi target dalam upaya kolektif yang dilakukan. Kedua, terikat menggunakan jaringan informal sebagai bentuk koordinasi. Para individu dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam gerakan sosial akan turut berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Terjadi negosiasi dan pelaksanaan inisiatif lainnya sebagai bentuk aktivitas kolektif gerakan sosial. Ketiga, memiliki identitas kolektif yang secara perlahan mulai terbentuk. Identitas kolektif sangat terikat pada terbentuknya konektivitas antar

---

<sup>48</sup> Donatella dela Porta dan Mario Diani, *Social Movements: An Introduction 2<sup>nd</sup> Edition*, (Blackwell Publishing, 1997): 226-238

<sup>49</sup> *Ibid.*, 20-22

anggota. Hal ini menciptakan kesadaran akan adanya tujuan bersama dan komitmen terhadap suatu faktor yang mendorong terbentuknya gerakan sosial.<sup>50</sup>

Gerakan sosial juga tidak hanya memiliki target tunggal untuk mengubah opini publik, melainkan juga berupaya untuk memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan politik di suatu negara. Melalui hubungan dengan aktor pemerintah, upaya untuk mengajukan beberapa isu tertentu terhadap kebijakan dapat dilaksanakan. Hubungan ini biasa dijalankan oleh para aktivis dari gerakan sosial yang dilaksanakan. Hal ini ditujukan agar mereka mampu memiliki *channel* langsung dengan para pengambil keputusan, serta terlibat dalam komunitas yang terdiri dari para representatif pemerintah, partai, dan kelompok kepentingan lainnya.<sup>51</sup>

Teori gerakan sosial ini berkaitan erat dengan konsep advokasi. Nyatanya advokasi merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan gerakan sosial yaitu untuk menciptakan perubahan atau peralihan terhadap isu tertentu. Sama halnya dengan pelaksanaan advokasi, gerakan sosial muncul atas adanya rasa ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu. Dalam hal ini, ketidakpuasan tersebut dapat berangkat dari perilaku diskriminatif terhadap pihak tertentu.

---

<sup>50</sup> Porta dan Diani, *Loc.cit.*, 20-22

<sup>51</sup> *Ibid.*, 229-238

### 1.5.5 Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil akibat adanya perbedaan yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Perlakuan tidak adil tersebut bisa dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria seperti gender, umur, warna kulit, ras, agama, kelas sosial, dan lain sebagainya. Biasanya pihak yang menerima tindakan diskriminasi merupakan pihak dari kelompok yang tersisihkan atau minoritas. Diskriminasi mampu mendorong terciptanya ideologi negatif yang memberikan perilaku tidak adil terhadap kelompok tertentu, seperti misalnya rasisme dan *sexism*.<sup>52</sup>

Diskriminasi didefinisikan sebagai perbedaan perlakuan atau pertimbangan yang menguntungkan atau merugikan individu berdasarkan kelompok, kelas, atau kategori tertentu yang dimiliki individu tersebut. Perbuatan diskriminasi dapat terbentuk karena adanya hukum atau kebiasaan yang mengedepankan hak terhadap kelas tertentu, atau menolak hak dari kelas tertentu.<sup>53</sup> Bentuk-bentuk diskriminasi dapat berdasarkan umur, kelumpuhan, upah, kondisi genetik, negara asal, agama, jenis kelamin, dan warna kulit atau ras.<sup>54</sup> Bentuk advokasi dan kemunculan gerakan sosial juga dapat disebabkan oleh perilaku diskriminatif dalam lingkungan sosial. Dalam kata lain, gerakan sosial dan advokasi dilakukan untuk menanggapi masalah

---

<sup>52</sup> Larry Willmore, "Discrimination", *Report on the World Social Situation 1997 Chapter VIII*, (2001): 1

<sup>53</sup> US Legal, "Discrimination Law and Legal Definition", *US Legal*, diakses pada 25 September 2019, <https://definitions.uslegal.com/d/discrimination/>

<sup>54</sup> EEOC, "Discrimination by Type", *U.S. Equal Employment Opportunity Commission*, diakses pada 25 September 2019, <https://www.eeoc.gov/laws/types/>

diskriminasi yang terjadi, sehingga mampu mendorong transformasi sosial dan perubahan dalam masyarakat.

*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menyatakan adanya dua bentuk diskriminasi yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung.<sup>55</sup> Contoh dari diskriminasi langsung adalah menolak seseorang untuk diterima sebagai karyawan karena ia berkulit hitam, perempuan, dan karena orientasi seksualnya. Sedangkan contoh dari diskriminasi tidak langsung adalah menciptakan sistem kualifikasi berdasarkan umur, berarti secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan yang memiliki periode waktu tertentu untuk tidak bekerja karena tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian memberikan kesempatan lebih bagi laki-laki untuk memenuhi kualifikasi tersebut.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini memerlukan data deskriptif atau berbasis penjelasan spesifik mengenai fenomena yang dikaji. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang cocok digunakan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian.

---

<sup>55</sup> UNESCO, "Discrimination", *UNESCO*, diakses pada 25 September 2019, <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/>

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik studi pustaka. Dokumen-dokumen atau data guna mendukung analisis penelitian diperoleh menggunakan sumber literatur berbasis internet seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, diawali dengan bab I yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka. Bab II yang berisi penjelasan variabel pertama yaitu latar belakang masalah rasisme terhadap *African-Americans* terutama masalah penembakan oleh aparat kepolisian, serta peran mereka dalam lingkungan sosial di Amerika Serikat. Selain itu dibahas pula beberapa gerakan sosial yang telah berupaya untuk memperjuangkan hak *African-Americans*. Bab III berisi keterkaitan variabel dengan teori hingga membentuk sebuah analisis penelitian. Dalam bab ini disertakan penjelasan lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disinggung di bab I, dan mengaitkan pula kasus dengan teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab IV mengakhiri keseluruhan penelitian dengan kesimpulan akhir, menyampaikan pesan atau inti utama dari penelitian yang dilakukan.